

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teknologi Informasi

a. Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi merupakan terjemahan dari kata *technologia* atau *techne* yang berarti keahlian dan *logia* yang berarti salah satu cabang dari ilmu. Dapat diartikan bahwa teknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keahlian. Plato (Saettler: 2004: 3) menganggap bahwa teknologi dan pengetahuan ilmiah merupakan hal yang terkait erat. Bagi Aristotle dan Salisbury (Abdulhak, 2003: 16) teknologi berupa penerapan pengetahuan sistematis yang tersusun secara sistematis. Teknologi bukan hanya dalam hal keterampilan tetapi teknologi termasuk seni pikiran dan seni rupa. Tujuan praktis dari penerapan teknologi adalah memberikan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia.

Teknologi selalu berubah semakin luas sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam istilah modern, teknologi merupakan kumpulan pengetahuan praktis yang tersusun secara sistematis yang merupakan hasil dari eksperimen atau kajian teori ilmiah (Saettler: 2004: 4). Dari munculnya teknologi tersebut mampu meningkatkan penghasilan barang dan jasa bagi masyarakat. Teknologi dalam hal ini berupa keterampilan dalam produksi, organisasi atau

tentang mesin. Asmani (2011: 21) berpendapat bahwa teknologi harus mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk mengubah atau mengendalikan sesuatu yang ada di sekitar. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan sebuah metode ilmiah yang merupakan penerapan dari suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat.

Informasi bisa diartikan sebagai data yang merupakan sesuatu yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan (Prasojo, 2011: 3). Berbeda dengan pendapat Asmani (2011: 104) yang berpendapat bahwa data dan informasi berbeda. Data adalah berupa tulisan, angka atau bisa juga huruf, tetapi yang dimaksud informasi adalah data yang sudah diolah. Informasi memiliki tiga fungsi utama, yaitu informasi sebagai proses, informasi sebagai pengetahuan dan informasi sebagai benda (Buckland, 1991: 4). Informasi sebagai proses artinya dengan adanya informasi maka mampu membuat apa yang diketahui oleh seseorang berubah. Informasi diartikan sebagai komunikasi tentang beberapa pengetahuan atau berita yang berdasarkan dari sumber berita atau fakta. Informasi sebagai pengetahuan bisa diartikan bahwa adanya suatu informasi mengurangi ketidakpastian. Sedangkan maksud informasi sebagai benda yaitu informasi bisa digunakan sebagai atribut atau objek dalam data atau dokumen, bersifat informatif karena memiliki kualitas pengetahuan dan informasi komunikasi. Sedangkan Wiener (Buckland, 1991: 4) tidak setuju jika informasi dikatakan sebagai atribut atau objek. Informasi adalah informasi, bukan merupakan materi. Davis (1999: 28)

mengemukakan bahwa informasi berasal dari data yang telah diolah sehingga bermanfaat bagi masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.

Teknologi informasi bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang di berhubungan dengan segala informasi melalui media komputer dan berkembang secara pesat (Prasojo, 2011: 4). Sedangkan menurut Kadir dan Triwahyuni (2013: 10) teknologi informasi mempelajari bagaimana menggunakan peralatan elektronika terutama komputer yang kegiatannya berupa penyimpanan, analisis dan distribusi informasi. Yang termasuk dalam informasi yaitu kata-kata, angka bilangan atau bisa dalam bentuk gambar.

Menurut George (2010: 4) teknologi informasi mencakup semua peralatan yang mampu menangkap, menyimpan, memproses, mengganti dan menggunakan informasi. Yang dimaksud peralatan tersebut antara lain perangkat keras komputer seperti mainframe, server, laptop dan PDA. Selain perangkat keras, juga ada perangkat lunak (*software*) yang terdiri dari sistem operasi dan aplikasi yang mendukung fungsi dari jaringan komputer dan peralatan lain seperti modem, router, switch dan database yang digunakan untuk penyimpanan data.

Teknologi informasi dan teknologi komunikasi (TIK) merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Teknologi informasi merupakan penggunaan media untuk memperoleh atau mengelola informasi, sedangkan teknologi komunikasi merupakan penggunaan alat untuk menyampaikan

pesan dari pengirim kepada penerima. Asmani (2011: 99) mendefinisikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai semua teknologi yang di dalamnya terdapat proses mengambil, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyebarkan dan kemudian menyajikan informasi. Istilah TIK ini muncul ketika teknologi komputer yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak dipadukan dengan teknologi komunikasi yang terjadi sekitar pertengahan abad ke-20 (Sutopo, 2012: 31). Teknologi informasi menggabungkan komputasi dengan sambungan komunikasi berkecepatan tinggi yang memuat data, suara dan video (Williams & Sawyer, 2011: 4). Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan berbagai alat yang menyediakan berbagai macam informasi yang dapat diakses oleh pengguna.

b. Manfaat Teknologi Informasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi salah satu pilar modern di masyarakat karena menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat (Dramani, 2013: 4). Pentingnya TIK dalam kehidupan masyarakat misalnya dalam perekonomian dan perdagangan memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi tanpa batas.

Kemajuan teknologi informasi juga mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat di dunia pendidikan. TI memberikan informasi yang begitu cepat sehingga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu dalam pembelajaran, TIK memiliki manfaat dalam memudahkan

proses pembelajaran. Menurut Rosenberg (2001: 7-8) perkembangan TIK menyebabkan terjadinya pergeseran proses pembelajaran. Pertama, pembelajaran yang biasanya berfokus pada tindakan pelatihan, dengan kemajuan teknologi informasi memberikan hasil pembelajaran yang berfokus pada penampilan atau hasil yang menguntungkan.

Kedua, hal yang berhubungan dengan akses pembelajaran, pembelajaran yang awalnya hanya berlangsung di ruang kelas kini bisa dilakukan di tempat lain dan tidak hanya selama jam pembelajaran berlangsung. Peserta didik dapat mengakses informasi dimana pun dan kapanpun menggunakan teknologi informasi.

Ketiga, penggunaan materi pembelajaran kini tidak bergantung pada kertas berisi panduan siswa yang diberikan di kelas. Saat ini materi pembelajaran bisa berupa *soft file* yang bisa diakses secara *online* menggunakan komputer. Materi pembelajaran yang diberikan di kelas tidak lagi terkesan kuno karena dengan kemudahan TIK dapat mengakses sumber materi pembelajaran yang akurat, valid, relevan dan *up to date*.

Ketiga, manfaat selanjutnya yaitu dari fasilitas fisik ke fasilitas kerja. Meskipun ada argumen kuat pembelajaran di kelas untuk fasilitas pelatihan untuk mendukung dunia kerja, saat ini di era digital menghubungkan fasilitas mereka dengan perusahaan melalui internet atau intranet.

Keempat, perubahan pembelajaran yang terakhir yaitu tentang waktu, dari waktu siklus ke waktu nyata. Kecepatan adalah ciri khas dunia digital

dan waktu adalah aset yang kompetitif. Saat ini, pendidik perlu meluangkan waktu untuk membangun program pembelajaran yang tepat dan relevan yang mampu menarik perhatian peserta didik. Memanfaatkan teknologi dalam teknik desain instruksional dan informasi diperlukan jika ingin mengikuti perubahan di sekitar.

c. Perangkat Teknologi Informasi

Berikut ini adalah beberapa jenis media teknologi informasi yang bisa digunakan sebagai sumber informasi yang biasa digunakan di kalangan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu antara lain:

- 1) Televisi yaitu berupa tampilan gambar disertai suara yang disalurkan melalui perantara gelombang elektromagnetik dan diterima oleh pesawat penerima dalam bentuk dan waktu yang sama. Televisi memiliki kelebihan karena mampu menyampaikan pesan melalui gambar disertai suara atau video.
- 2) Radio merupakan perangkat elektronik alat komunikasi yang berupa audio yang dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik dipancarkan melalui udara.
- 3) Komputer merupakan alat yang di dalamnya memuat berbagai program yang digunakan untuk mengolah data yang bisa berwujud gambar, tulisan, suara maupun angka dan diolah menjadi sebuah informasi sebagai bahan dalam pengambilan suatu keputusan. Williams dan Sawyer (2011: 4) mendefinisikan komputer sebagai program yang dapat deprogram mesin

yang mampu menerima data, fakta dan angka mentah dan memproses atau memanipulasinya menjadi informasi yang bisa berguna dalam bentuk laporan atau ringkasan. Tujuan penggunaan komputer yaitu untuk mempercepat penyelesaian masalah atau untuk meningkatkan dan memudahkan produktivitas.

- 4) Internet merupakan kumpulan jaringan yang dapat mendukung penyaluran informasi secara cepat dan luas di seluruh dunia. Rakhmat (2008: 178) mengemukakan bahwa internet merupakan singkatan dari kata *interconnected networking* atau *international networking*. Internet sebagai salah satu perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi media paling efektif dalam kehidupan manusia, terutama dalam mengembangkan pengetahuan masyarakat (Ghazal, Aldowah, & Umar, 2017: 689). Saat ini pembelajaran tidak hanya dilakukan secara tradisional yaitu pendekatan tatap muka, tetapi pembelajaran bisa dilakukan tanpa pendekatan tatap muka misalnya dengan menggunakan e-laerning TIK.
- 5) Telepone genggam (*handphone*) merupakan salah satu alat elektronik yang merupakan gabungan dari teknologi radio dan teknologi komunikasi, digunakan untuk komunikasi jarak jauh (Ekrakene, 2007: 2009). Saat ini telepon genggam disebut dengan *smartphone* yang diartikan oleh Williams & Sawyer (2011:15) sebagai telepon selular yang memiliki prosesor kecil, terdapat memori, layar dan modem bawaan sehingga mampu digunakan sebagai alat untuk pesan teks, kamera, game,

akses internet, pemutar musik dan video dan sebagainya. Ponsel memiliki banyak modalitas yang setara dengan indra manusia yang mampu melihat apapun melalui kamera, mendengar apapun melalui microphone, menyentuh apapun dengan sensor haptik (Linawati, Mahendra, Neuhold, You, 2014: 8). Selain itu, ponsel menjadi semakin kuat karena semua jenis data disimpan dan diakses melaluinya.

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Sumber Informasi Politik

Teknologi Informasi memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, hal ini membantu pemerintah dalam pelayanan pemerintahan yang transparan kepada publik (Williams & Sawyer, 2011: 10). Banyak pemerintah lokal dan negara bagian juga memiliki situs *web* yang bisa menangani pelayanan warga negara dari membayar pajak, untuk memperbarui pendaftaran kendaraan dan lisensi pengemudi, melihat akta kelahiran dan pernikahan sertifikat, dan melamar pekerjaan sektor publik. Internet juga mengubah sifat politik, memungkinkan kandidat politik dan kelompok kepentingan politik untuk terhubung dengan pemilih dengan cara-cara baru. Akan tetapi ada kelemahan penggunaan TIK dalam politik, karena komputer telah memungkinkan legislator untuk merancang daerah pemilihan yang membuatnya hampir tidak mungkin bagi mereka untuk dipilih, alat elektronik juga membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk partai politik untuk mengayunkan atau melanggar undang-undang kampanye, dan mesin voting komputerisasi masih belum selalu menghitung suara seperti seharusnya (Sawyer, 2011: 11).

Pengetahuan politik bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti media elektronik. Media elektronik bisa berupa radio, televisi maupun telepon.

1) Telepon dan politik

Telepon sebagai alat komunikasi berguna dalam sosialisasi atau kampanye politik yang mampu mempengaruhi para pemilih. Berikut ini adalah beberapa hubungan antara telepon dan politik yang dikemukakan oleh Rakhmat (2011: 196). Melalui panggilan dengan telepon, mampu mengumpulkan pendukung untuk hadir dalam rangka mendukung kandidat tertentu dan menambah jumlah pemilih untuk mendukung kandidat tertentu dalam waktu yang singkat. Melalui telepon juga mampu memperkenalkan kandidat dengan cepat, misalnya melalui pengiriman pesan. Telepon mampu membantu survei tentang opini telepon.

2) Kampanye radio

Radio memiliki peran selama adanya pemilihan umum. Melalui radio, seorang kandidat bisa melakukan kampanye menyebarkan imbauan kepada para pemilih melalui radio. Ada beberapa pedoman yang bisa digunakan para kandidat dalam kampanye melalui radio antara lain dengan memilih tema pokok pembicaraan yang baik, membuka siaran dengan pernyataan yang memikat, memulai pidato dengan sederhana, hindari membicarakan data statistika terlalu berlebihan dan sebagai penutup perlu kesimpulan yang pasti.

3) Politik televisi

Saat ini televisi biasa digunakan sebagai saluran dalam komunikasi kampanye politik modern. Televisi menjadi salah satu media komunikasi politik tokoh politik kepada masyarakat. Televisi memberikan informasi politik melalui berbagai tayangan dalam televisi yang menampilkan tokoh-tokoh politik dan karakternya, sehingga menimbulkan penilaian masyarakat terhadap tokoh politik.

4) Inovasi

Alat elektronik dan alat komunikasi yang semakin berkembang dengan berbagai inovasi mampu memperluas jangkauan kampanye politik dengan tujuan persuasif meningkatkan jumlah pendukung kandidat yang bersangkutan,

Selain media elektronik, media cetak yang berupa sebaran, brosur, foto dan sebagainya digunakan sebagai alat utama dalam kampanye politik oleh kandidat untuk berkomunikasi dengan massa. Kampanye melalui media cetak ini bisa melalui surat langsung atau koran.

1) Surat langsung

Kampanye politik melalui surat langsung biasanya ditujukan kepada pengumpulan dana, pengenalan profil kandidat dan imbauan kepada masyarakat agar turut berpartisipasi dalam pemungutan suara.

2) Surat kabar

Surat kabar yang terdiri dari tiga bagian yaitu ikhwal berita, editorial dan iklan memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik. Melalui surat kabar mampu mempengaruhi para pemilih karena menyajikan citra dari seorang kandidat.

3) Poster sebagai perantara

Poster politik dinilai sebagai media komunikasi paling menarik karena disajikan dengan gambar dan beraneka warna. Biasanya poster tentang kandidat ditemukan di sepanjang jalan yang ditempel pada lanskap seperti dinding bangunan, tiang, pohon dan sebagainya.

Mas'oed & MacAndrews (2011: 46-49) berpendapat bahwa pengetahuan politik dapat diperoleh melalui kegiatan sosialisasi politik melalui berbagai macam sarana sebagai berikut.

- 1) Keluarga memiliki pengaruh terhadap pembentukan sikap seorang anak terhadap wewenang kekuasaan.
- 2) Sekolah memiliki pengaruh dalam memperluas pengetahuan generasi muda tentang dunia politik dan bagaimana seharusnya mereka berperan.
- 3) Kelompok pergaulan mampu memberikan pengaruh kepada anggota kelompoknya untuk menyesuaikan diri terhadap sikap dan perilaku yang dilakukan di kelompok tersebut, termasuk dalam hal politik.
- 4) Pekerjaan juga membawa pengaruh kepada seseorang karena kelompok pekerja dapat dijadikan patokan dalam kehidupan politik.

- 5) Media massa seperti yang dijelaskan di atas, memberikan informasi tentang peristiwa yang terjadi dalam pemerintahan atau peristiwa politik.
- 6) Kontak politik langsung dapat mengubah pandangan politik seseorang dari pandangan sistem politik yang telah ditanamkan dalam keluarga, masyarakat maupun sekolah apabila telah mendapat pengalaman atau kontak langsung dengan politik.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perangkat teknologi informasi yang berupa radio, televisi, *handphone*, internet, komputer, surat kabar bermanfaat sebagai sumber informasi politik di kalangan remaja atau siswa pendidikan menengah.

2. Gender

a. Pengertian Gender

Laki-laki dan perempuan dipandang berbeda, dari jenis kelamin maupun gender. Secara etimologis, gender berasal dari kata *genus* (Latin) yang diartikan sebagai jenis atau tipe. Haraway (Adam, 2005: 6) membedakan *sex* dengan gender, sedangkan dalam bahasa Jerman arti *sex* dan gender tidak dibedakan. *Sex* secara sederhana diartikan sebagai jenis kelamin yang ditentukan dari ciri fisik atau biologis yang melekat. Misalnya jenis kelamin laki-laki dilihat dari ciri biologis yang memiliki jakun, memiliki penis, dan disebut berjenis kelamin perempuan dilihat dari ciri biologis yang memiliki vagina, rahim, menyusui dan sebagainya. Berbicara tentang gender,

berhubungan dengan maskulinitas dan feminitas dalam dunia sosial (Adam, 2005: 5).

Dalam Ensiklopedia Feminisme (2002: 177) gender diartikan sebagai penggolongan atau pengelompokan atribut atau perilaku yang dimiliki laki-laki atau perempuan yang terbentuk dari kultur. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan gender adalah berbagai perbedaan dalam peran, perilaku, mental, karakteristik dan emosional yang berkembang dalam masyarakat. Pengelompokan atribut dalam gender ada beberapa macam seperti yang dijelaskan dalam *Webster College Dictionary* (2001: 511) yaitu *masculine* atau *feminisme*, *neuter* atau *common*.

Konsep gender menurut Showalter (Umar, 2010: 30) lebih dari pengelompokan menjadi laki-laki dan perempuan karena gender memandang laki-laki dan perempuan lebih jauh dari konstruksi sosial budayanya. Gender merupakan konsep yang dipahami untuk membedakan laki-laki dan perempuan bukan dari bentuk biologisnya tetapi berdasarkan peran sosial dan budaya. Konsep gender bisa diartikan sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari proses sosial budaya, sehingga muncul anggapan bahwa peran laki-laki dan perempuan berbeda. Sebagai contoh, di masyarakat ada anggapan bahwa laki-laki dianggap makhluk yang kuat sedangkan perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah. Menurut Caplan (Muawanah, 2009: 8) mengemukakan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan bukan hanya berdasarkan jenis kelamin secara biologis, tetapi perbedaan perilaku tersebut muncul dari proses budaya dan

sosial. Jenis kelamin laki- laki atau perempuan merupakan kodrat dari Tuhan yang tidak bisa dirubah, tetapi gender bisa mengalami perubahan dari waktu ke waktu atau dari tempat ke tempat (Muawanah, 2009: 8). Untuk memahami perbedaan antara jenis kelamin dan gender dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Perbedaan Seks dan Gender

Seks (Jenis Kelamin)	Gender
• Tidak dapat dirubah	• Dapat berubah
• Tidak dapat dipertukarkan	• Dapat dipertukarkan
• Berlaku sepanjang zaman	• Tergantung waktu
• Berlaku di mana saja	• Tergantung budaya setempat
• Merupakan kodrat Illahi (ciptaan Tuhan)	• Bukan merupakan kodrat Tuhan (buatan manusia)

Sumber: Agustino (2007: 231)

b. Peran Gender dalam Politik

Selama ini masih terdapat permasalahan gender yaitu adanya diskriminasi terhadap perempuan. Sebagai contoh adanya anggapan bahwa tugas utama perempuan hanya mengurus rumah tangga sedangkan laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah, maka dari itu perempuan dianggap tidak perlu berpendidikan tinggi. Padahal semua manusia berhak mengembangkan diri melalui pendidikan tinggi. Adanya anggapan bahwa tugas perempuan terbatas pada sektor domestik sementara tugas laki-laki luas dalam sektor publik menyebabkan adanya pandangan bahwa pekerjaan perempuan di sektor publik dipandang rendah.

Dari permasalahan tersebut, beberapa kelompok perempuan memperjuangkan hak mereka untuk ikut berpartisipasi aktif dalam ruang publik dalam lingkup sosial, ekonomi maupun politik. Berikut ini adalah beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam memperjuangkan peran perempuan (Agustino, 2007: 231-236) sebagai berikut.

1) Kendala politik

Di negara Indonesia, kendala utama politik yang dihadapi kaum perempuan adalah peran politik kaum pria yang terlalu dominan dan kurangnya dukungan partai.

2) Kendala ideologis

Di beberapa negara termasuk Indonesia terjadi permasalahan ideologis seperti kondisi sosio-kultural yang membatasi ruang gerak perempuan di ruang publik. Yang kedua adalah kurangnya kepercayaan, maksudnya kurangnya rasa percaya diri seorang perempuan mengakibatkan kurangnya perwakilan perempuan dalam ruang publik seperti politik, lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif hingga partai-partai politik. Yang ketiga adalah adanya persepsi bahwa politik itu dianggap permainan kotor yang mengakibatkan kaum perempuan untuk ikut aktif dalam persaingan politik. Permasalahan keempat yaitu kurangnya dukungan media massa dalam mendukung peran perempuan dalam ruang publik.

3) Kendala sosio ekonomi

Keadaan sosio ekonomi membawa pengaruh dalam rekrutmen anggota legislatif perempuan. Di Indonesia, yang menjadi permasalahan kurangnya partisipasi perempuan dalam politik antara lain karena faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan dan keterbatasan informasi.

Tuntutan untuk kesetaraan gender telah menjadi bagian dari politik yang lebih luas dalam wacana demokrasi dan modernisasi. Penyebab terjadinya ketidaksetaraan gender dapat dipahami di tingkat makro, yang berakar pada sistem atau struktur sosial yang dikenal sebagai sistem patriarki (Krook & Mackay, 2011: 3). Dalam sistem patriarki, kedudukan laki-laki lebih dipentingkan dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan termasuk politik. Dalam masyarakat patrilineal, hubungan keturunan diambil dari garis ayah atau garis laki-laki sehingga kedudukan laki-laki lebih diutamakan (Sugihastuti & Sastryani, 2007: 65).

Tingkat partisipasi politik memiliki korelasi dengan latar belakang sosial seperti usia, pendidikan dan gender menjadi hal yang menonjol dalam hal pemilihan dalam politik. Kelompok perempuan yang lebih tua tampak sulit untuk menjadi peserta politik sementara perempuan yang lebih muda yang telah memiliki hak pilih merasa bahwa memilih adalah hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (Glasberg & Shannon, 2011: 111). Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa gender memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik seseorang.

3. Organisasi Siswa

a. Organisasi Siswa Sebagai Pendidikan Politik

Dalam sebuah organisasi, para anggota berlatih untuk sebuah kepemimpinan, menyadari betapa pentingnya visi bersama, berlatih untuk pengambilan keputusan, perumusan strategi dan pertukaran utama (Kaplan, 2011: 26). Organisasi yang efektif memiliki anggota yang memiliki minat dalam melakukan pekerjaan terbaik mereka yang didorong oleh bekal pengetahuan dan minat untuk menjadi anggota organisasi tersebut. Setiap anggota dalam organisasi memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap kesuksesan organisasi tersebut. Kontribusi anggota akan menjadi yang terbaik ketika persepsi anggota terhadap organisasi tersebut positif (Glover, 2015: 25). Setiap anggota dari sebuah organisasi harus saling menghormati dan menghargai pendapat dan posisi masing-masing sebagai bentuk penghargaan terhadap orang lain (Deal & Peterson, 2009: 187).

Seorang pemimpin terhubung dengan budaya manifestasi dari suatu organisasi. Sangat penting bagi seorang pemimpin untuk menyadari peran yang dimilikinya karena akan mempengaruhi organisasi tersebut (Glover, 2015: 26). Kepemimpinan dalam organisasi memiliki beberapa kompetensi yang dapat mempengaruhi budaya dalam sekolah yaitu disposisi positif. Mendukung hubungan sosial, menumbuhkan rasa berbagi dan memiliki, fokus pada visi, meningkatkan kepercayaan dan mampu memberi dan menerima kritikan (Glover, 2015: 33).

Seorang individu belajar tentang nilai, sikap dan perilaku politik melalui proses sosialisasi politik atau pendidikan politik. Pendidikan politik memberikan kontribusi dalam membentuk dan mengembangkan asumsi dan harapan seseorang tentang anggapan apa yang dapat diterima atau layak secara politik (Glasberg & Shannon, 2011: 51). Istilah pendidikan politik digunakan untuk beberapa program studi sosial di sekolah yang memiliki tujuan dalam pemahaman dan mempengaruhi perilaku politik seseorang. Clearly (1971: 3) berpendapat bahwa pendidikan politik lebih dekat dengan ide bahwa program sekolah secara alamiah berpusat pada pemahaman tentang peran warga negara dalam pemerintahan, yaitu tentang bagaimana seorang individu berinteraksi dengan lingkungan politik dan bagaimana bisa mengendalikannya, lebih dari upaya untuk menanamkan kesadaran nasionalisme pada siswa.

Sosialisasi politik atau pendidikan politik berlangsung ketika seorang individu melihat, mendengarkan dan meniru sikap dan nilai politik di lingkungan keluarga, sekolah maupun dari teman atau orang lain yang dihormati. Sosialisasi politik merupakan proses induksi kedalam budaya politik, proses pembelajaran sikap dan nilai yang diterima dari budaya politik dan subkultur politik di sebuah negara yang penting untuk menciptakan kestabilan pemerintahan (Cord *et al.*, 1985: 20).

Sekolah merupakan salah satu tempat untuk pendidikan politik agar para siswa memiliki keterampilan dalam berpolitik atau memiliki kesadaran politik. Selain melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn) yang masuk dalam kurikulum formal, ada beberapa organisasi siswa yang mendukung adanya pendidikan politik di sekolah. Pendidikan politik di sekolah melalui aktivitas organisasi siswa antara lain melalui organisasi siswa intra sekolah (OSIS), Pramuka, Koperasi Siswa, Paskibra, Palang Merah Remaja dan Remaja Masjid.

Dari pemaparan teori di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas dalam organisasi merupakan salah satu pendidikan politik di sekolah karena memberikan pengalaman kepada siswa tentang kepemimpinan, manajemen organisasi, mengemukakan pendapat atau pengambilan keputusan, kegiatan pemilihan ketua organisasi dan sebagainya.

b. Jenis- Jenis Organisasi Siswa

Berikut ini adalah beberapa jenis organisasi sekolah yang ada di kalangan pendidikan menengah, antara lain organisasi siswa intra sekolah (OSIS), Pramuka, Koperasi Siswa, Paskibraka, Palang Merah Remaja dan Remaja Masjid.

1) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan salah satu bentuk organisasi kesiswaan di sekolah. Berdasarkan Pasal 4 Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kesiswaan dijelaskan bahwa OSIS merupakan organisasi resmi di sekolah dan tidak ada hubungan organisatoris dengan organisasi kesiswaan di sekolah lain.

Di dalam organisasi siswa intra sekolah atau yang sering disebut dengan OSIS disebut dengan salah satu pendidikan politik di sekolah karena di dalam organisasi ini siswa dilatih kepemimpinan dan rasa tanggungjawab melalui pembinaan OSIS. Selain pembinaan OSIS, kegiatan OSIS dengan musyawarah, menyampaikan pendapat, kegiatan upacara bendera, kegiatan sosial melatih kepemimpinan dan tanggungjawab siswa. Selain itu, dalam hal pemilihan pengurus dan ketua OSIS merupakan salah satu pendidikan demokrasi bagi siswa di sekolah.

2) Praja Muda Karana (Pramuka)

Pramuka merupakan singkatan dari praja muda karana. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, organisasi pramuka merupakan warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan yang mengamalkan satya pramuka dan darma pramuka. Organisasi ini disebut sebagai upaya pendidikan politik karena melatih siswa sikap politik atau sikap sebagai seorang warga negara. Siswa dididik bagaimana menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga neagra seusai dengan tujuan Pramuka. Selain itu, melalui organisasi Pramuka dapat meningkatkan rasa cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme.

3) Koperasi Siswa

Secara umum koperasi diartikan sebagai sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat kegiatan menjual barang untuk kebutuhan sehari-hari para anggotanya yang tujuannya bukan untuk mencari untung, oleh karena itu

harga barang yang dijual di koperasi dijual dengan harga murah (Sugono. 2008: 730). Sedangkan koperasi siswa adalah sebuah organisasi di sekolah yang beranggotakan siswa, di dalamnya terdapat kegiatan menjual barang untuk kebutuhan di lingkungan sekolah. Koperasi sekolah dikelola secara mandiri oleh anggota koperasi yang terdiri dari siswa dan didampingi oleh guru. Koperasi pada umumnya untuk mewujudkan kehidupan perekonomian masyarakat yang adil dan makmur. Dimulai dari lingkungan sekolah, koperasi sekolah didirikan untuk melatih kesadaran siswa untuk hidup selalu bergotong royong, tanggungjawab serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

4) Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Paskibraka merupakan singkatan dari pasukan pengibar bendera pusaka. Pasukan pengibar bendera pusaka ini bertugas mengibarkan bendera merah putih pada saat upacara khususnya dalam rangka peringatan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Kegiatan organisasi ini bertujuan untuk membentuk siswa sebagai generasi muda agar memiliki kedisiplinan, rapi, cerdas, dan berjiwa nasionalisme. Berdasarkan Permenpora Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, anggota paskibraka diseleksi oleh pemerintah daerah dari seluruh wilayah di Indonesia sebagai Pengibar dan Penurun Bendera Pusaka dengan tujuan menumbuhkan dan memantapkan nilai-nilai kebangsaan, menumbuhkan semangat persatuan, cinta tanah air, bela negara dan menumbuhkan sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

5) Palang Merah Remaja (PMR)

Palang Merah Remaja atau PMR adalah salah satu organisasi di sekolah yang mendapat binaan dari Palang Merah Indonesia. PMR merupakan salah satu tempat bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan kepalangmerahan (Gunawan, 2012: 274). Organisasi PMR memiliki tujuan menumbuhkan rasa kemanusiaan terhadap orang lain dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang kepalangmerahan. Pembinaan kepalangmerahan perlu ditanamkan kepada peserta didik agar memiliki jiwa dan semangat kemanusiaan dan memiliki kepedulian terhadap sesama manusia. Dalam kegiatan ini siswa dilatih tentang hal-hal dasar atau keterampilan yang berhubungan dengan kegiatan kemanusiaan agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

6) Rohani Islam (Rohis)

Salah satu organisasi di sekolah dalam bidang keagamaan adalah Rohani Islam atau Rohis. Kata Rohanis Islam yang sering disebut dengan istilah Rohis dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang dijadikan tempat bagi peserta didik untuk menjalankan aktivitas dakwah di sekolah (Widiyantoro, 2003: 66). Rohis merupakan organisasi siswa yang kegiatannya merupakan kegiatan ekstrakurikuler, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan memperluas cara berpikir peserta didik agar mampu meningkatkan prestasi belajar (Yusuf, 2004: 36).

Organisasi ini biasanya dibentuk di lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Di dalam organisasi Rohis ini juga terdapat susunan kepengurusan seperti halnya yang ada dalam OSIS. Rohis di sekolah memiliki kegiatan seperti kajian yang bertujuan memperdalam dan memperkuat ajaran Islam.

4. Kesadaran Politik

a. Pengertian Kesadaran Politik

Istilah kesadaran politik dapat diartikan sebagai kesadaran terhadap politik. Kata sadar diartikan sebagai *insaf*, merasa, tahu dan mengerti (Sugono, 2008: 1096). Kesadaran merupakan keadaan merasa, mengetahui dan mengerti tentang suatu hal. Situasi kesadaran dapat dipahami ketika manusia “mengetahui apa yang sedang terjadi” atau lebih tepatnya “persepsi unsur-unsur di lingkungan sekitar dalam suatu volume, waktu dan ruang, pemahaman makna dan memproyeksikan status mereka dalam waktu dekat (Endsley & Garland, 2000: 5).

Kesadaran dalam interaksi sosial berhubungan dengan bagaimana individu memaknai informasi yang diberikan orang lain, bagaimana sikap mereka dalam memperhatikan informasi, bagaimana niat menyampaikan informasi kepada orang lain dan bagaimana kesadaran membawa hasil yang dikaitkan dengan manfaat (Markopoulos, Ruyter & Mackay, 2009: vi).

Kesadaran terhadap situasi yaitu menyadari situasi lingkungan dengan mengumpulkan informasi, menafsirkan dan memahami informasi untuk

membuat keputusan berdasarkan informasi dan mengambil tindakan yang sesuai (Laar, Tretmans & Borth, 2013: 3). Mengetahui apa yang terjadi di lingkungan, memahami dan menafsirkan informasi yang diperoleh, bersikap waspada terhadap situasi adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat keputusan agar dapat bertindak yang sesuai. Hal-hal tersebut disebut dengan kesadaran terhadap lingkungan sekitar (Laar, Tretmans & Borth, 2013: 4). Kesadaran ini terbentuk dari perolehan informasi tentang lingkungan sekitar, tentang siapa yang melakukan apa dan di mana, kemudian informasi ini ditafsirkan secara khusus dalam suatu tujuan. Melalui pengetahuan dari informasi yang diperoleh, dapat digunakan untuk membantu menginterpretasi dan pemahaman lingkungan sekitar. Informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber.

Duval (2001: 1-2) mengemukakan teori yang berhubungan dengan kesadaran diri yang terdiri dari aspek kognitif, afektif dan konsekuensi perilaku dari perhatian yang berfokus pada diri sendiri. Kesadaran diri dipengaruhi oleh aspek afektif, ketika seseorang berfokus pada hal-hal negatif maka kesadaran diri menjadi negatif dan sebaliknya jika seseorang berfokus pada perhatian aspek positif diri, semakin meningkat kesadaran diri yang berpengaruh positif. Begitu pula dengan kesadaran politik yang terdiri dari aspek kognitif, afektif dan perilaku. Oleh karena itu perlu dipahami tentang kegiatan politik di lingkungan sekitar.

Istilah politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang artinya negara kota dan diturunkan menjadi kata lain seperti *polities*

yang berarti warga negara, *politikos* yang berarti kewarganegaraan atau *civics*, dan *politike tehne* yang berarti kemahiran politik (Cholisin, 2012: 1). Laswell (Goodin, 1996: 8) mengartikan politik secara klasik yaitu politik sebagai siapa yang mendapatkan, tentang apa dan bagaimana mendapatkan. Aristotle (Agustino, 2007:5) mengemukakan beberapa definisi tentang politik, yang pertama politik merupakan segala pembahasan negara sebagai *polis* (kota terbaik), tentang bagaimana seharusnya bentuk negara yang memiliki tujuan menjaga persatuan dalam keberagaman dan bagaimana mengusahakan segala keputusan untuk kebaikan bersama. Pendapat Saltou yang sejalan dengan J. Barents (Agustino, 2007:6) mendefinisikan politik adalah ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan negara, tugas-tugas lembaga negara dan bagaimana hubungan antara warga negara dan negara.

Kedua, Aristotle mendefinisikan politik sebagai kekuasaan. Di dalam menciptakan negara yang bertujuan untuk kebaikan bersama, maka diperlukan pemimpin-pemimpin yang berkuasa untuk mengatur dan mewujudkan tujuan negara tersebut. Dan yang ketiga, menurut Aristotle politik itu membahas tentang peran warga negara yang penting untuk berlangsungnya kehidupan di sebuah negara untuk mencapai tujuan negara.

Surbakti (2010: 1) membagi konsep politik menjadi 5 pandangan. Yang pertama politik merupakan segala usaha yang dilakukan oleh warga negara untuk membicarakan suatu permasalahan negara sehingga mencapai keputusan untuk kebaikan bersama. Kedua, politik diartikan sebagai segala sesuatu yang membahas tentang negara, tentang bagaimana sistem

penyelenggaraan yang baik untuk negara. Selain itu politik juga bisa diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Politik selain membahas tentang kebaikan bersama, politik juga terdiri dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perumus kebijakan publik untuk menghasilkan suatu kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat umum. Dan yang terakhir politik bisa dijadikan sebagai alat untuk mencari atau mempertahankan komponen-komponen penting yang mampu mendukung suatu kepentingan.

Politik memiliki berbagai makna dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti yang dikemukakan Surbakti (2010: 1-9) sebagai berikut.

1) Pendekatan kekuasaan

Dilihat dari sudut pandang kekuasaan, politik dapat diartikan sebagai usaha dalam memperoleh maupun mempertahankan kekuasaan. Dalam hal ini makna politik sering dipandang sebagai tindakan yang kotor, karena dalam memperoleh ataupun mempertahankan kekuasaan sering dilakukan dengan cara yang tidak benar atau melakukan segala cara untuk memperoleh kekuasaan.

2) Pendekatan institusional

Dalam sudut pandang institusional, politik merupakan negara beserta institusi-institusinya. Politik membahas tentang hubungan antara institusi di dalam negara seperti tugas dan batas wewenang yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga negara.

3) Pendekatan moral

Berbeda dengan pendekatan kekuasaan yang menganggap politik adalah sesuatu yang kotor, dalam pendekatan moral politik dianggap sebagai sesuatu yang mulia. Disebut dengan mulia karena di dalam kegiatan politik berusaha merumuskan dan mewujudkan apa yang dinamakan dengan warga negara yang baik atau tujuan negara yang baik. Selain itu, politik dalam pendekatan moral selalu mengutamakan hal-hal yang baik bukan yang efisien.

4) Pendekatan konflik

Makna politik dalam pendekatan konflik hampir sama dengan pendekatan kekuasaan. Letak perbedaannya ada pada tujuannya, jika dalam pendekatan kekuasaan politik digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, dalam pendekatan konflik politik digunakan untuk memperoleh atau mempertahankan kepentingan.

Kepentingan bisa berupa material maupun non material. Dalam hal ini, konflik muncul dari berbagai usaha dalam memperoleh maupun mempertahankan kepentingan. Konflik bisa terjadi antarkelas sosial, antarpemegang kekuasaan, bisa berupa konflik fisik maupun nonfisik, atau konflik yang berujung pada menang kalah, kalah-kalah atau konsesus.

5) Pendekatan fungsional

Makna politik dilihat dari pendekatan fungsional merupakan kegiatan yang di dalamnya merumuskan kebijaksanaan publik berdasarkan alokasi

nilai-nilai kepentingan. Di dalam kegiatan politik membahas tentang siapa, apa, bagaimana dan kapan dalam merumuskan kebijakan politik.

6) Pendekatan analisis wacana politik

Politik dalam pendekatan ini diartikan sebagai kegiatan yang membicarakan tentang berbagai fenomena atau apapun yang terjadi dalam dunia politik. Yang dimaksud fenomena politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan negara, pemerintahan, tugas dan wewenang lembaga negara dan sebagainya. Dalam hal ini politik memiliki fungsi dalam hal mempengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan politik.

Berbicara tentang politik, secara sederhana yaitu pembicaraan yang berhubungan dengan penguasa untuk memerintah, pemerintah dan negara dan warga negaranya. Oppenheim (Mayers, 1983 : 249) mengemukakan tentang konsep utama politik menjadi 4 konsep, meliputi *concepts of power* atau konsep kekuasaan, *social freedom* atau kebebasan sosial, *egalitarianism* (persamaan derajat), dan *public interest* atau kepentingan. Berikut ini adalah beberapa konsep dasar dalam politik yang harus dipahami untuk mencapai kesadaran politik seperti yang dijelaskan oleh Crick dalam *Essays on Citizenship* (2004) yaitu sebagai berikut.

- 1) Konsep *government* atau memerintah yang terdiri dari *power* (kekuasaan), *force* (cara pemaksaan), *authority* (kewenangan), *order* (ketertiban).

Power atau kekuasaan adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Kekuasaan menurut Betrand Russel (Crick, 2004 : 83) sering keliru dalam pengertian yang lemah, kekuasaan yang kuat sering diartikan sebagai mencapai tujuan yang jelas, kekuasaan yang tak terbantahkan.

Force atau cara pemaksaan yaitu ketika ada tekanan fisik atau dengan senjata benar-benar digunakan atau ketika ancaman digunakan untuk menciptakan ketakutan. Kekuasaan bukanlah kekerasan, cara kekerasan tidak bisa dibenarkan. Max Weber (Crick, 2004 : 84) tidak mendefinisikan negara (negara modern) sebagai kekerasan, tetapi sebagai monopoli dari arti legitimasi kekerasan (paksaan). Ia berpendapat bahwa negara modern setidaknya memastikan hukum dan ketertiban dengan mencoba meniadakan kekerasan.

Authority atau otoritas atau kewenangan adalah ketaatan yang diberikan kepada seseorang dalam memenuhi fungsi yang dirasa perlu. Kewenangan tidak selalu berarti otoriter, kewenangan tidaklah buruk, kewenangan disebut sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut.

- a) Kewenangan berasal dari prosedur yang diterima secara umum.
- b) Tidak menekan pada pembahasan alternatif definisi dan pemenuhan kebutuhan.
- c) Tidak memperluas kekuasaan yang fungsinya secara umum.

Order atau ketertiban adalah persepsi paling umum bahwa ekspektasi rasional tentang politik, sosial dan hubungan ekonomi hampir semuanya akan dipenuhi. Keadilan, hak, kebebasan dan kesejahteraan memerlukan ketertiban. Ketertiban bisa rusak apabila salah satu unsur tidak dilakukan.

2) Konsep *relationships* atau hubungan yang terdiri dari *law* (hukum), *justice* (keadilan), *representation* (perwakilan), *pressure* (penekanan).

Natural Rights atau hak alam atau hak-hak dasar adalah apa yang diklaim sebagai syarat minimum untuk kehidupan manusia yang semestinya. Kehidupan, kemerdekaan dan harta menurut John Locke, atau kehidupan, kemerdekaan dan kebahagiaan menurut Thomas Hobbes (Crick, 2004 : 87).

Individuality atau kepribadian adalah konsep yang dekat dengan hak-hak dasar, apa yang dianggap unik bagi setiap manusia. Masyarakat sering percaya bahwa objek kegiatan politik adalah mencapai kebahagiaan individu. Sebagai makhluk individualistis, masyarakat tetap harus menghormati perbedaan individu.

Freedom atau kebebasan, dalam arti positif yaitu dalam pembuatan pilihan dan melakukan hal-hal kepentingan publik berdasarkan kemauan sendiri atau bukan dengan jalan paksaan. Dalam ide klasik, kebebasan terikat pada konsep kewarganegaraan, sesungguhnya untuk aktivitas politik sendiri, orang yang merdeka adalah seseorang yang mengambil bagian dalam kehidupan publik tanpa paksaan.

Welfare atau kesejahteraan rakyat adalah keyakinan bahwa kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat dan individu perlu diperhatikan pemerintah untuk kelangsungan hidup rakyatnya, tidak hanya sekedar untuk bertahan hidup tetapi lebih ke kebahagiaan rakyat.

- 3) Konsep *people* atau rakyat yang terdiri dari *natural rights* (hak alam), *individuality* (kepribadian), *freedom* (kebebasan), *welfare* (kemakmuran).

Law atau hukum adalah badan peraturan-peraturan umum, perintah-perintah, larangan, dan pemilikan yang dibuat atau diakui pemerintah, diterbitkan dan dilaksanakan dan diakui sebagai sesuatu yang mengikat. *Justice* atau keadilan, yaitu secara umum apa yang benar atau apa yang dikatakan orang sebagai hasil dari berbagai proses yang diterima sebagai hasil yang adil. *Representation* atau perwakilan yaitu pernyataan untuk mewakili banyak orang karena mereka mewujudkan dalam lambang eksternal dari persetujuan, hanya ada satu yang mewakili dari banyak subjek. *Pressure* atau tekanan mencakup arti pemerintah dan orang-orang yang dapat mempengaruhi satu sama lain secara politis untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan, selain oleh hukum atau dengan kekerasan.

Kesadaran politik menurut Surbakti (2010: 144) diartikan sebagai kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, jika warga negara memiliki pengetahuan dan pemahaman politik yang baik maka warga negara tersebut akan memiliki kesadaran dalam menjalankan hak

dan kewajibannya terhadap negara untuk berpartisipasi aktif untuk menjaga stabilitas politik. Kesadaran politik timbul dari pemahaman dan pengalaman individu terhadap suatu sistem politik melalui informasi yang didapatkan dari komunikasi politik yang dilakukan oleh warga negara. Kesadaran politik seseorang bisa diukur dari tingkat pengetahuan tentang lingkungan politik dan tingkat minat dan perhatian terhadap kegiatan politik di dalam sistem pemerintahan di daerahnya.

Pendidikan, minat dalam politik dan keterlibatan dalam proses politik adalah menjadi kunci yang sangat menentukan kesadaran dan pengetahuan seseorang tentang politik. Banyak ahli berpendapat bahwa individu dengan tingkat pendidikan tinggi, minat politik, dan aktivisme politik tingkat kepercayaan yang tinggi dalam institusi mempengaruhi kesadaran politik seseorang (Cakir & Sekercioglu, 2015: 4). Kesadaran politik bukan diukur dari seberapa sering seseorang menonton atau mengikuti berita politik, akan tetapi seberapa besar minat dan pengetahuan seseorang terhadap politik (Zaller, 1992: 335).

Seperti Zaller, kesadaran politik diukur berdasarkan kapasitas pengetahuan politik faktual responden dan minat terhadap politik umum (Classen, 2011: 822). Skala kesadaran politik ditentukan oleh seberapa suka dan tidak suka terdaftar untuk dua partai mayoritas, seberapa banyak media berita yang diakses secara teratur, item untuk menguji responden untuk menilai pemimpin dan sikap terhadap kelompok politik, dan item pertanyaan

untuk mengetahui kapastias pengetahuan politik faktual terkait nama tokoh politik dengan benar.

Kesadaran politik tersebut diperoleh dari pengetahuan politik melalui persepsi, penalaran atau intuisi, jadi kesadaran politik merupakan kemampuan manusia untuk memperoleh informasi politik (Sasikala & Francisca, 2017: 78). Tidak hanya sebatas kemampuan untuk memperoleh informasi politik, tetapi warga negara yang memiliki kesadaran politik, baik individu maupun kelompok mampu untuk ikut serta dalam kegiatan politik (Milbiath, 2001: 143). Dengan berbekal pengetahuan politik dan penghayatan terhadap politik tersebut, maka kesadaran atau ketaatan terhadap politik akan terbentuk.

Seseorang yang memiliki kesadaran politik, bukan berarti harus terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis (Dja'far, 2008: 3). Tetapi kesadaran politik terdiri dari pengetahuan, pemahaman, memiliki sikap dan sadar terhadap sistem politik yang ada sehingga mampu bertindak dengan cerdas dalam mempengaruhi sistem politik yang ada. Kesadaran politik tidak hanya diukur dari perilakunya saja, tapi sejauh mana individu tersebut memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap terhadap politik. Sikap masyarakat terhadap politik sangat dibutuhkan, karena minat dan perhatian terhadap politik dapat membawa arah kemajuan system politik di sebuah negara.

Dari berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kesadaran politik adalah kesadaran warga negara akan hak dan

kewajibannya sebagai warga negara khususnya dalam politik. Berikut ini akan dipaparkan tentang hak dan kewajiban politik warga negara.

b. Hak dan Kewajiban Politik

Rudolf von Jhering (Marwan, 2014: 28) menjelaskan bahwa hak merupakan sesuatu yang menjadi hal penting bagi seseorang, sehingga kepentingan tersebut dilindungi oleh hukum. Kepentingan yang merupakan hak tersebut dapat berupa kepentingan pribadi maupun kepentingan umum yang layak diterima oleh seseorang yang bersangkutan (Asikin, 2013: 115). Hak politik merupakan hak yang dimiliki warga negara untuk turut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Contoh hak politik warga negara misalnya ikut serta dalam memberikan suara dalam pemilihan umum. Sedangkan John Lock (Asshidiqie, 2012: 87) hak politik meliputi hak untuk hidup, memperoleh kebebasan dan hak untuk memiliki (*life, liberty, property*).

Istilah "hak politik" meliputi hak asasi manusia tradisional, seperti kehidupan, kebebasan, keamanan pribadi, dan kebebasan berekspresi. Hak-hak politik dan hak sosial membentuk dua himpunan bagian dari konsep hak asasi manusia yang lebih luas, yang merupakan spesies hak moral yang universal, secara fundamental penting, dan dipegang oleh semua individu (MacMillan, 1986: 284). Hak diberikan kepada warga negara karena hak memiliki fungsi esensial dari hak yaitu melindungi kepentingan pemegang

hak, dan fungsi non-esensial untuk memberikan klaim, kebebasan, kekuasaan atau kekebalan terhadapnya (Wellman, 2011: 171).

Perwujudan hak politik menurut Hak Asasi Manusia Internasional (Universal Declaration of Human Right) antara lain yang pertama yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dalam pasal 19. Yang kedua tertulis dalam pasal 20 yang menyatakan bahwa berkumpul dan mengadakan musyawarah tanpa ada unsur paksaan termasuk hak politik. Yang ketiga yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan dan kesempatan untuk menduduki sebuah jabatan pemerintahan seperti yang tertulis dalam pasal 21.

Hak-hak politik yang diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tidak jauh beda dengan hak-hak politik yang dijamin dalam UDHR. Hak-hak politik yang dimaksud adalah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan baik secara langsung maupun perwakilan yang dipilih secara bebas. Selanjutnya yaitu setiap orang memiliki kesempatan dan hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya. Mendapatkan akses dalam pemerintahan melalui syarat yang sama dan umum juga termasuk hak politik.

Di Indonesia, hak politik diatur dalam konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang lain seperti Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perwujudan hak politik dalam UUD NRI 1945 terdapat dalam Pasal 28, yaitu hak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pengaturan mengenai perwujudan hak politik diatur dalam Pasal 23, 24 dan 25 yaitu hak untuk bebas memilih sesuai keyakinan politik, hak mengemukakan dan menyebarluaskan pendapat, hak untuk berkumpul, berapat dan berserikat secara lisan dan/atau tulisan, hak untuk berkumpul, berapat dan berserikat untuk maksud damai, hak mendirikan partai politik atau lembaga swadaya masyarakat, dan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Hak politik warga negara Indonesia selain dijamin dalam UUD NRI 1945 juga dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) dalam pasal 21, 22, dan 25. Hak politik tersebut yaitu hak untuk berkumpul secara damai, hak berserikat, dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih, hak memperoleh akses pelayanan umum di negaranya

Bagir Manan (Rosyada, 2004: 214) mengusulkan beberapa hak yang termasuk dalam hak politik, yaitu hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Pelaksanaan hak-hak politik tersebut dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan. Dalam negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, rakyat dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi negara (Kusnardi & Ibrahim, 1983: 328). Dalam perkembangannya, negara semakin berkembang dan semakin kompleks, akibatnya kedaulatan rakyat tidak dapat dilaksanakan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan system perwakilan, atau bisasa dikenal dengan istilah demokrasi perwakilan. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (Asshiddiqie, 2012: 169-170). Clearly (1971: 3) berpendapat bahwa perlu upaya pemahaman tentang peran warga negara dalam pemerintahan, yaitu tentang bagaimana seorang individu berinteraksi dengan lingkungan politik dan bagaimana bisa mengendalikannya, lebih dari upaya untuk menanamkan kesadaran nasionalisme pada siswa.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kedaulatan di tangan rakyat berdasarkan perwakilan rakyat, maka di Indonesia diselenggarakan pemilihan umum secara berkala setiap lima (5) tahun sekali. Hal ini juga merupakan perwujudan pemenuhan hak untuk memilih maupun dipilih dalam

rangka lembaga perwakilan rakyat sebagai wakil suara rakyat. Pemilu mempunyai kaitan erat dengan negara demokrasi dan negara hukum. Pemilu merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Di antara ciri negara hukum yang berkaitan dengan pemilu adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, persamaan di depan hukum dan pemerintahan serta adanya pemilihan umum yang bebas.

Dengan adanya pemilu, hak asasi rakyat yang berkaitan dengan bidang politik dapat disalurkan, hak untuk sama depan hukum dan pemerintahan juga mendapat saluran, dan dengan adanya pemilu yang bebas maka maksud pemilu sebagai sarana penyaluran hak demokratis atau hak politik rakyat, dapat mencapai tujuannya Mahfud MD (1999: 219-222). Hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih) (C.S.T. Kansil, 1986: 2-5).

1) Hak memilih (hak pilih aktif)

Hak memilih adalah hak warganegara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum (Surbakti, 2010: 145).

2) Hak dipilih (hak pilih pasif)

Hak dipilih adalah hak warganegara untuk dipilih menjadi anggota sesuatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilihan umum.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hak politik yang diatur di dalam konstitusi Indonesia antara lain (1) hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, (2) hak untuk memilih dan dipilih, (3) hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27, 28J dan Pasal UUD NRI 1945 sebagai berikut. Dalam Pasal 27 UUD NRI 1945 disebutkan bahwa sebagai warga negara berkewajiban untuk taat hukum dan pemerintahan dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Selanjutnya, sebagai warga negara Indonesia berkewajiban dalam menghormati hak asasi manusia dan kewajiban untuk tunduk ada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang seperti yang tercantum dalam Pasal 28 J UUD NRI 1945. Selain itu, dalam pasal 30 UUD NRI 1945 disebutkan bahwa warga negara berkewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik merupakan kesadaran warga negara akan hak dan kewajiban politik seperti ikut serta dalam pemerintahan, ikut serta dalam pemilihan umum dan kebebasan mengemukakan pendapat.

c. Indikator Kesadaran Politik

Konsep kesadaran politik adalah istilah yang luas dalam ilmu politik. Secara istilah, kesadaran politik dapat diartikan sebagai kecanggihan politik, informasi politik, pengetahuan politik dan keahlian politik (Amer, 2009: 359). Kesadaran politik utamanya memperoleh pengetahuan tentang politik. Menurut Carpini dan Keeter (1996: 186) kesadaran politik mengacu pada seberapa banyak pemilih informasi faktual tentang politik. Secara keseluruhan, kesadaran politik berarti akses ke informasi politik, partisipasi politik, eksposur media, minat dalam politik dan pendidikan dengan informasi politik.

Seseorang dikatakan memiliki kesadaran jika telah mencapai tahapan indikator kesadaran politik seperti yang dikemukakan Soekanto (1982: 140) yaitu yang pertama memiliki pengetahuan politik. Setelah memiliki pengetahuan politik diharapkan mampu memahami apa yang terjadi dalam politik. Melalui pengetahuan dan pemahaman politik, maka diharapkan terbentuk sikap dan perilaku yang sadar akan politik. Dapat disimpulkan indikator tahapan kesadaran politik sebagai berikut.

1) Pengetahuan politik

Pengetahuan menurut Bloom (Notoatmodjo, 2010: 50) merupakan hasil dari penginderaan manusia bisa dari mendengar, melihat, mencium, meraba, mencecap dan sebagainya terhadap suatu objek. Kesadaran politik bisa muncul berawal dari pengetahuan politik. Pengetahuan masyarakat

tentang politik dan pemerintahan akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil dalam berpartisipasi dalam politik. Contoh bentuk partisipasi politik tersebut adalah kegiatan pemilihan umum yang terdiri dari pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden. Aspek pengetahuan yang perlu dimiliki seseorang untuk mewujudkan kesadaran politik (*political literacy*) menurut Arthur, (2008: 62) yaitu sebagai berikut.

- a) Informasi dasar tentang permasalahan : siapa yang memegang kekuasaan; dari mana uang berasal; bagaimana lembaga yang bersangkutan bekerja
- b) Bagaimana untuk secara aktif terlibat menggunakan pengetahuan di atas dan memahami sifat masalah,
- c) bagaimana memperkirakan yang paling efektif cara untuk menyelesaikan masalah ini,
- d) Cara mengenali bagaimana juga tujuan kebijakan telah dicapai ketika masalah tersebut diselesaikan.
- e) Bagaimana untuk memahami sudut pandang orang lain dan membenarkan mereka atas tindakan mereka, dan selalu berharap untuk membenaran diri sendiri.

2) Pemahaman politik

Pemahaman menurut Winkel & Mukhtar (Sudaryono, 2012: 44) diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menangkap arti dan makna dari apa yang dipelajari dengan cara menguraikan atau mengubah suatu hal yang dipelajari ke dalam bentuk yang lain. Memahami sesuatu berarti

memiliki pengetahuan dengan benar. Memiliki pengetahuan politik, belum tentu paham tentang politik. Perlu pendidikan politik yang bertujuan memberikan pemahaman tentang politik kepada masyarakat. Pendidikan politik bisa dilakukan di sekolah dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan melalui ekstrakurikuler, atau juga bisa dilakukan pendidikan politik di masyarakat. Pendidikan politik diberikan kepada peserta didik masyarakat agar mampu memahami politik sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik.

3) Sikap terhadap politik

Tahapan selanjutnya setelah pengetahuan dan pemahaman politik, seseorang dikatakan sadar politik jika memiliki sikap terhadap politik. Azwar (2010: 3) mengartikan sikap sebagai tanggapan atau reaksi terhadap suatu objek sehingga menimbulkan seseorang bertindak dengan cara-cara tertentu yang disebut dengan perilaku. Menurut Surbakti (2010: 144) yang dimaksud sikap politik adalah penilaian seseorang terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah. Setelah paham akan apa yang terjadi dalam sistem politik suatu negara, akan memunculkan penilaian tentang baik atau buruknya suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah. Berawal dari penilaian, maka diharapkan warga negara mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara dalam mempengaruhi suatu kebijakan. Yang dimaksud sikap dalam kesadaran politik (*political literacy*) menurut menurut Arthur (2008: 62) didasarkan pada nilai-nilai kebebasan, toleransi, keadilan, menghormati,

kebenaran dan menghormati penalaran seperti apa yang disebut prosedural nilai-nilai yang diandaikan dalam politik.

4) Perilaku politik

Ada hubungan antara sikap dan perilaku menurut Robbins & Judge (2013: 110) bahwa pernah diadakan penelitian terhadap sikap, bahwa terdapat hubungan timbal balik sebab akibat antara sikap dan perilaku. Sikap seseorang ditentukan dari apa yang dilakukan. Sitepu (2012: 88) merumuskan perilaku politik sebagai kegiatan yang di dalamnya berkaitan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Perilaku politik merupakan segala kegiatan yang berhubungan antara pemerintah dan rakyat, antar lembaga pemerintah maupun interaksi antara kelompok dengan individu yang di dalamnya berhubungan dengan pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan politik (Surbakti, 2010: 15).

Perilaku politik berupa tindakan memerintah atau tindakan yang taat kepada pemerintah. Selain itu, yang termasuk perilaku politik yaitu segala kegiatan yang mampu mempengaruhi atau mendukung, menuntut atau memperjuangkan suatu keputusan politik agar sesuai dengan kepentingan rakyat dan mampu mewakili rakyat sebagai negara demokrasi.

Perilaku politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku politik yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang tugasnya membuat, menjalankan dan menegaskan akan suatu adanya keputusan politik. Yang kedua adalah masyarakat sebagai anggota dari pemerintah atau suatu lembaga

yang tugasnya melaksanakan, menentang atau mempengaruhi suatu keputusan politik yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk ikut berperilaku dalam politik tidak harus ikut berkampanye memberikan dukungan bagi partai politik dalam suatu pemilihan umum, tetapi bisa juga dilakukan dengan membuat tulisan tentang kritik terhadap pemerintahan.

Seseorang yang memiliki kesadaran politik, bukan hanya seorang penonton informasi: dia adalah seseorang yang mampu partisipasi aktif dan komunikasi, atau penolakan positif dan beralasan untuk berpartisipasi (Arthur, 2008: 62). Dari beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik merupakan keadaan seseorang yang memiliki pengetahuan dan minat dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam politik.

d. Pentingnya Kesadaran Politik

Kesadaran politik akan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi warga negara terhadap politik. Selain kesadaran politik, tingkat kepercayaan warga negara terhadap pemerintah atau sistem politik juga mempengaruhi tingkat partisipasi politik warga negara. Kesadaran politik akan mempengaruhi partisipasi politik seseorang, semakin tinggi kesadaran politik, maka semakin tinggi keaktifan dalam partisipasi politik, dan sebaliknya (Cholisin & Nasiwan, 2012: 149). Pettit (1997: 819) menjelaskan tentang 4 tipe partisipasi politik. Jika seseorang memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang sama-sama tinggi, maka seseorang tersebut dapat

digolongkan ke dalam tipe partisipasi politik cenderung aktif dan sebaliknya jika kesadaran dan kepercayaan terhadap politik rendah, maka seseorang tersebut bisa dikatakan memiliki partisipasi politik pasif-tertekan atau apatis.

Jika seseorang memiliki kesadaran politik yang tinggi tetapi tingkat kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, maka seseorang tersebut termasuk dalam tipe partisipasi militant radikal, dan sebaliknya jika seseorang memiliki tingkat kesadaran politik yang rendah tetapi sangat tinggi kepercayaan kepada pemerintah maka seseorang tersebut termasuk ke dalam tipe partisipasi politik tidak aktif atau pasif. Selain tingkat kesadaran politik dan tingkat kepercayaan politik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik warga negara seperti tingkat pendidikan, status sosial dan ekonomi, pengalaman berorganisasi, pekerjaan, jenis kelamin dan sebagainya.

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Politik

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran politik seseorang, antara lain status sosial, status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi (Surbakti, 2010: 185). Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kesadaran politik yang akan berlanjut pada tingkat partisipasi politik seseorang. Ada dua pendekatan dalam memandang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran politik seseorang (Asfar, 2006: 137-141). Yang pertama disebut dengan mazhab Columbia yang menekankan faktor-faktor sosiologis. Kesadaran politik dipengaruhi oleh karakteristik

sosial seseorang, misalnya pekerjaan atau profesi, pendidikan, latar belakang sosial seperti agama, wilayah tempat tinggal, jenis kelamin, usia dan sebagainya. Faktor jenis kelamin dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kesadaran politik seseorang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ahmed *et al.* (2015: 67) bahwa kesadaran politik di kalangan pelajar perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kesadaran politik pelajar laki-laki. Laki-laki lebih memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi dalam partisipasi kegiatan pemilihan umum dibanding pemilih perempuan (Kuotsu, 2016: 197). Sedangkan mazhab kedua disebut dengan mazhab Michigan yang menekankan pada faktor psikologis. Kesadaran politik seseorang dipengaruhi oleh ikatan emosional terhadap suatu sistem politik termasuk instrument dan institusi di dalamnya. Orientasi terhadap isu-isu politik dan tokoh politik yang ada pada sistem politik tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesadaran politik seseorang.

Menurut Ruslan (2000: 97-98) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran politik sebagai berikut. Yang pertama, jenis budaya politik dapat mempengaruhi kesadaran politik individu. Kesadaran politik individu tumbuh dari kultur politik yang membentuk kepribadian politik. Kedua yaitu adanya revolusi atau perubahan budaya yang ada dalam masyarakat. Kemampuan dan kecakapan khusus yang dimiliki individu akan mempengaruhi kesadaran politik. Seperti tingkat pendidikan, perbedaan tingkat pendidikan akan mempengaruhi tingkat kesadaran politik. Tingkat kesadaran politik juga dipengaruhi oleh adanya pemimpin politik atau tokoh

politik yang hadir di masyarakat yang mampu memberikan arahan kepada masyarakat.

Sedangkan Surbakti (2010: 185) berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran politik yaitu status sosial, status ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kesadaran politik seseorang yang akan berdampak pada partisipasi politik seseorang. Begitu pula pendapat dari Almond & Verba (1984: 70) bahwa kesadaran politik seseorang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan tingkat pendidikan. Jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kesadaran politik seseorang. Status sosial ekonomi dalam masyarakat juga mempengaruhi kesadaran politik, seperti profesi dan mata pencahariaan.

Priannejad & Janssen (2017: 11-12) mengemukakan ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran politik seseorang yaitu informasi digital, pengembangan partai politik dan pengembangan media sosial. Selain dari informasi digital dan media sosial, Jones's (Click *et al.*, 2017: 614) mengungkapkan bahwa ternyata figuritas seorang tokoh bahkan selebritis dapat menjadi sarana dalam menumbuhkan kesadaran politik seseorang. Ketenaran seorang tokoh figure dapat mendorong para penggemar untuk mengikuti jejaknya. Oleh karena itu, adanya media masa sangat berperan dalam mempengaruhi kesadaran politik seseorang. Seperti yang diungkapkan oleh Pasek & Kenski (2006: 132) bahwa media massa memiliki peran yang kuat dalam menyediakan informasi yang akan membantu meningkatkan

ketertarikan terhadap politik bagi pemuda. Selain bersumber dari media massa, Coles mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran politik seseorang dapat dipengaruhi oleh orang tua, teman sebaya (Blankemeyer *et al.*, 2009: 229). Tingkat kesadaran politik dapat dikategorikan sebagai tinggi atau rendah, seperti hasil penelitian Bartle (2000: 480). Sedangkan Amer (2009: 364) dalam penelitiannya mengkategorikan kesadaran politik ke dalam level rendah, sedang dan tinggi. Tingkat kesadaran akan mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang. Pada dasarnya setiap masyarakatnya memiliki kesadaran politik akan tetapi tingkatannya berbeda-beda. Tingkat kesadaran dapat dibagi ke dalam empat tingkatan menurut Bull (Djahiri, 1985: 24). Yang pertama disebut kesadaran *anonim*, seseorang memiliki kesadaran yang tidak berdasarkan landasan yang jelas atau tidak berorientasi pada tujuan yang jelas. Tingkat kesadaran ini menjadi tingkat kesadaran yang paling rendah di antara yang lain. Yang kedua adalah kesadaran *heteronom* atau kesadaran yang berdasarkan adanya perubahan atau adanya motivasi sehingga memiliki orientasi yang jelas. Yang ketiga disebut dengan kesadaran *sosionomous*, kesadaran yang berorientasi pada nilai-nilai masyarakat yang dijadikan arus utama. Yang keempat kesadaran otonom atau kesadaran yang muncul dari sebuah konsep dalam diri sendiri. Kesadaran otonom termasuk level kesadaran paling tinggi sehingga diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

B. Kajian Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini khususnya untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mondak tahun 1995 tentang koran dan kesadaran politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya media masa (surat kabar) lokal tidak memberikan pengaruh peningkatan pengetahuan politik nasional atau internasional, tetapi berkontribusi terhadap pengetahuan tentang kampanye politik lokal.

Hasil penelitian Pasek, Kenski, dan Romer (2006) yang tentang hubungan media masa dengan kesadaran politik menunjukkan bahwa pengguna media baik informasi maupun hiburan berorientasi, memfasilitasi keterlibatan warga negara. Sedangkan media berita khususnya efektif dalam meningkatkan kesadaran politik.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini khususnya variabel gender adalah penelitian yang dilakukan oleh Ida (2013) tentang media, gender dan politik di Indonesia: Analisis tekstual Liputan media tentang Politisi Perempuan dan Aktivisme Politik Perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat marginalisasi politisi perempuan dalam pemberitaan media.

Hasil penelitian Amer (2009) tentang kesadaran politik perempuan di Nagaland, hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas wanita memiliki moderat kesadaran tentang politik. Tingkat kesadaran politik mereka

dipertanggungjawabkan oleh mereka tingkat minat dalam politik, pola penggunaan media dan frekuensi diskusi politik. Hasilnya juga melaporkan dampak terbatas dari kesadaran politik terhadap partisipasi perempuan dalam kegiatan pemilihan.

Hasil penelitian Abdo-Katsipis (2017) tentang kesadaran politik perempuan di Tunisia menunjukkan bahwa perbedaan mencolok antara pria dan perempuan dalam tingkat kesadaran politik mereka, yang menyebabkan hambatan untuk partisipasi politik perempuan. Menyumbang faktor untuk menjelaskan kesenjangan adalah perbedaan dalam tingkat publik perempuan. Kehadiran dalam pengaturan perkotaan, yang bertentangan dengan daerah pedesaan, dan kurangnya akses ke informasi tentang politik.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini khususnya variabel aktivitas siswa dalam organisasi adalah penelitian yang dilakukan oleh Zuhri (2010) tentang proses sosialisasi politik di sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan proses sosialisasi politik secara tidak langsung merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada peserta didik melalui pengembangan diri baik melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun organisasi yang ada di sekolah seperti OSIS, MPK, Rohis, Paskibra, PMR dan lain sebagainya.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini khususnya variabel kesadaran politik Cakir dan Sekercioglu (2015) dalam penelitian yang tentang kesadaran politik dan demokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam lanjutan demokrasi variabel kesadaran politik seperti pendidikan dan

politik. Partisipasi memiliki dampak positif pada kepercayaan publik di pengadilan, sedangkan di negara-negara dengan tingkat demokrasi yang lemah politiknya lebih tinggi kesadaran mengarah ke peningkatan sinisme tentang pengadilan.

Hasil penelitian Claassen dan Highton (2009) tentang elit politik dan kesadaran politik di media, menunjukkan bahwa hanya informasi yang baik menanggapi polarisasi elit yang semakin meningkat dengan menjadi lebih partisan dalam pendapat mereka. Dengan tidak adanya motivasi untuk mengembangkan opini yang koheren, bahkan penyederhanaan lingkungan politik tidak menutup celah antara mereka yang lebih dan tidak sadar politik.

Hasil penelitian Hidayat (2016) tentang kesadaran politik dan partisipasi politik menunjukkan bahwa partisipasi politik pada pemilihan legislatif 2014 di Kelurahan Karangayar dipengaruhi oleh status sosial ekonomi dan kesadaran politik masyarakat.

C. Kerangka Pikir

1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kesadaran Politik Siswa Pendidikan Menengah di Kecamatan Bantul

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kesadaran politik siswa melalui pendidikan politik di sekolah maupun di masyarakat. Teknologi informasi menyediakan berbagai informasi politik yang dapat diakses siswa. Teknologi informasi

yang dijadikan sebagai sumber informasi antara lain radio, televisi, komputer, jaringan internet dan telepon genggam.

Teknologi informasi merupakan media komunikasi politik yang membantu menginformasikan segala hal tentang politik untuk menumbuhkan pengetahuan masyarakat tentang politik. Melalui pengetahuan politik, dapat memberikan peningkatan terhadap pemahaman politik, sikap dan perilaku politik.

Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sumber informasi politik menjadi komponen penting dalam mendukung peningkatan kesadaran politik siswa. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kesadaran politik salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sumber informasi politik.

2. Pengaruh Gender terhadap Kesadaran Politik Siswa Pendidikan Menengah di Kecamatan Bantul.

Selain teknologi informasi, gender masih menjadi permasalahan politik di Indonesia. Gender merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi tingkat kesadaran politik siswa. Adanya anggapan bahwa perempuan tidak perlu tampil di ruang publik membuat kaum perempuan kurang peduli terhadap politik. Gender atau perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan mempengaruhi tingkat kesadaran politik seseorang.

Seorang remaja perempuan sering dikatakan jarang terlibat dalam kegiatan politik (Harris, 2008: 483). Meskipun saat ini anggapan tersebut

sudah mulai luntur, tetapi masih ada stigma yang menganggap perempuan tidak perlu banyak tampil di sektor publik, karena sudah menjadi kebiasaan bahwa yang selalu tampil di sektor publik terutama masalah politik sebagian besar didominasi oleh laki-laki.

3. Pengaruh Aktivitas Siswa dalam Organisasi terhadap Kesadaran Politik Siswa Pendidikan Menengah di Kecamatan Bantul

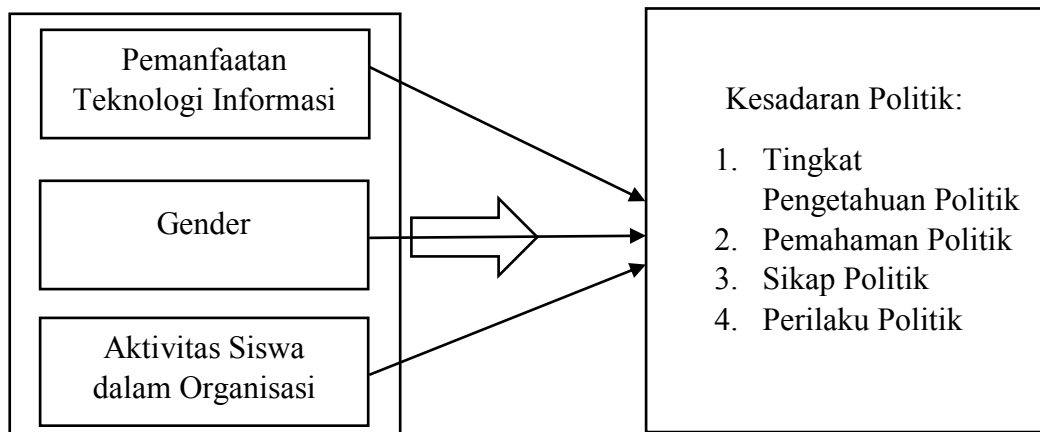
Aktivitas siswa dalam organisasi sebagai pendidikan politik selain melalui pembelajaran PPKn di sekolah. Aktivitas organisasi di sekolah antara lain organisasi siswa intra sekolah (OSIS), organisasi praja muda karana (Pramuka), palang merah remaja (PMR), koperasi siswa, pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka), dan kerohanian Islam (Rohis) merupakan pendidikan politik di sekolah di luar kegiatan belajar di kelas.

Melalui berbagai macam kegiatan organisasi sekolah, siswa akan memiliki gambaran dalam berpartisipasi politik di masa depan. Ketertarikan terhadap politik dapat dilihat dari ketertarikan siswa dalam kegiatan organisasi sekolah bagi siswa di sekolah. Aktivitas Siswa dalam organisasi memberikan pengalaman kepada siswa tentang kepemimpinan, manajemen organisasi, pemilihan ketua organisasi dan sebagainya diduga mampu memberikan peningkatan kesadaran politik siswa.

4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Gender, dan Aktivitas Siswa dalam Organisasi terhadap Kesadaran Politik Siswa di Kecamatan Bantul.

Pemanfaatan teknologi informasi, gender, dan aktivitas siswa dalam organisasi diasumsikan memberikan pengaruh terhadap kesadaran politik siswa. Hal ini dikarenakan ketiga komponen tersebut menjadi pendukung dalam menciptakan kesadaran politik siswa. Dengan mengoptimalkan ketiga variabel tersebut maka kesadaran politik siswa akan meningkat.

Berikut kerangka pikir pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, gender, dan aktivitas siswa dalam organisasi terhadap kesadaran politik siswa pendidikan menengah di Kecamatan Bantul.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Penjelasan gambar di atas yaitu peneliti menggambarkan bahwa ketiga variabel yaitu pemanfaatan teknologi informasi, gender, dan aktivitas siswa dalam organisasi menjadi komponen yang mempengaruhi tingkat kesadaran politik. Hal ini dikarenakan teknologi informasi sebagai sumber

informasi politik dan aktivitas siswa dalam organisasi sebagai kesatuan dalam membentuk kesadaran politik. Melalui berbagai informasi politik yang didapatkan dari pemanfaatan teknologi informasi, dan pengalaman berorganisasi akan membentuk pemahaman politik, sikap politik dan perilaku politik. Selain itu, gender akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang terhadap politik yang akan membentuk kesadaran politik yang tinggi atau rendah.

Ketiga komponen tersebut juga diasumsikan memberikan pengaruh terhadap kesadaran politik siswa. Oleh karena itu, perlu diketahui seberapa besar pengaruh ketiga komponen tersebut dalam pembentukan kesadaran politik siswa. Harapannya ketika pemanfaatan teknologi informasi, gender, dan aktivitas siswa dalam organisasi memberikan pengaruh yang besar maka lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar siswa mampu meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sumber politik dan meningkatkan aktivitas siswa dalam organisasi. Selain itu, diharapkan dengan diketahui pengaruh gender terhadap kesadaran politik siswa, maka akan merubah anggapan bahwa perempuan juga memiliki hak politik.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir di atas, dapat diajukan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut.

1. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kesadaran politik siswa pendidikan menengah di Kecamatan Bantul.

2. Gender memiliki pengaruh terhadap kesadaran politik siswa pendidikan menengah di Kecamatan Bantul.
3. Aktivitas siswa dalam organisasi memiliki pengaruh terhadap kesadaran politik siswa pendidikan menengah di Kecamatan Bantul.
4. Pemanfaatan teknologi informasi, gender, aktivitas siswa dalam organisasi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kesadaran politik siswa pendidikan menengah di Kecamatan Bantul.